

keadilan sosial ...” (DPR RI, 2020). Dedikasi dan komitmen Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB dapat dipahami sebagai perwujudan prinsip ”aktif” dalam karakter ”bebas-aktif” dari politik luar negeri Indonesia. Untuk memperkuat komitmen Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden dengan kewajiban mempersiapkan perumusan kebijakan dan melakukan koordinasi langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia berdasarkan kepentingan nasional<sup>1</sup>.

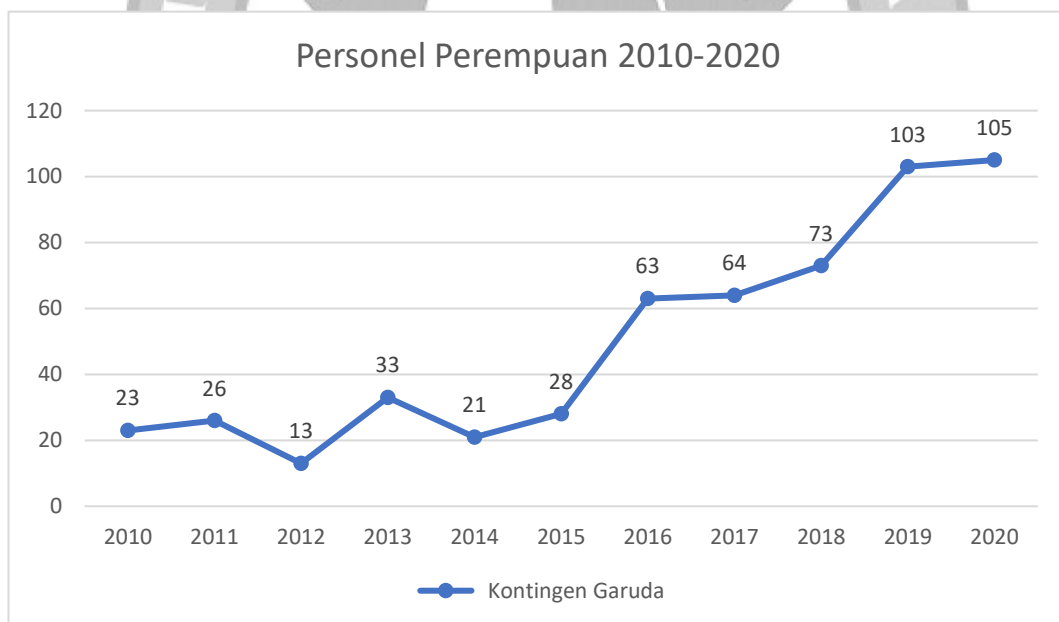
Dari seluruh gelaran pasukan Indonesia pada MPP PBB, MONUSCO dan UNIFIL merupakan dua misi yang ditugaskan kepada Kontingen Garuda dengan personel perempuan terbanyak di antara negara-negara yang ditugaskan di dua misi tersebut dengan masing-masing jumlah personel perempuan Kontingen Garuda (data per 31 Juli 2021) sebanyak 47 pasukan dan 82 pasukan. Walaupun Kontingen Indonesia hanya mengirim sebanyak 129 personel perempuan saja, namun Indonesia masih menjadi peringkat keenam sebagai negara kontributor personel perempuan terbanyak (United Nations Peacekeeping, 2021). Apabila lebih diteliti lagi hanya terdapat 7 negara yang mengirim personel perempuan lebih dari 100 orang yang mana Ethiopia sebagai kontributor terbanyak untuk MPP dengan total 591 personel perempuan.

Fakta lapangan menemukan bahwa setiap konflik terjadi telah menjadi

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden ini mengatur antara lain tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan protokol TKMPP.

peristiwa yang mencetak banyak penyintas terdampak, terutama perempuan dan anak-anak sebagai kaum marjinal yang mana sering kali luput dari pandangan para pembuat kebijakan, sehingga peran perempuan sangat dibutuhkan dalam menjangkau dan merangkul para penyintas terutama perempuan dan anak-anak. Di sisi lain personel perempuan dalam MPP PBB pertama kali dilibatkan pada tahun 1993 dengan misi utama mempertahankan gencatan senjata dan stabilitas keamanan pada saat sedang dilakukannya upaya politik dalam penyelesaian konflik secara damai pada saat itu (Mazrieva, 2020). Namun demikian, tesis ini menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara personel perempuan dan laki-laki dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.



**Gambar 1.1. Penugasan Personel Perempuan di MPP 2010-2020**

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Kesenjangan ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya, masih kurangnya jumlah perempuan yang memenuhi kualifikasi sebagai personel MPP dan stereotipe yang terkesan diskriminatif masih melekat pada perempuan sebagai jender yang lebih lemah daripada laki-laki (Bigio & Rachel, 2018). Kedua hal ini yang tidak jarang menjadi alasan mengapa lebih banyak perempuan ditempatkan pada bagian administratif MPP PBB. Mengingat kembali kehadiran dari Pasukan Penjaga Perdamaian Dunia adalah untuk menjaga dan memelihara perdamaian tanpa menggunakan kekerasan, dapat dikatakan kehadiran perempuan menjadi hal yang akan sangat membantu pemulihan pasca konflik dari pada penduduk setempat. Pemerintah Indonesia meyakini bahwa keterlibatan perempuan sebagai pasukan MPP dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam memulihkan stabilitas dengan pendekatan unik yang dimiliki oleh perempuan (Kementerian Luar Negeri RI, 2019). Sejumlah laporan menyebutkan bahwa perempuan cenderung memiliki sifat mengayomi sehingga dipandang lebih efektif dalam membangun kembali rasa percaya dan aman warga di daerah konflik, dibandingkan pasukan pria<sup>2</sup> (Bigio & Rachel, 2018).

Terlepas dari kesenjangan yang masih terjadi, Indonesia menjadi salah satu negara kontributor yang terus mendukung keterlibatan peran perempuan dalam pasukan Kontingen Garuda. Hal ini diukung penuh oleh Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia yang menyatakan bahwa perempuan memainkan peran kunci dalam memelihara perdamaian dunia dan meningkatkan kerjasama

---

<sup>2</sup> Contohnya dalam melakukan pendekatan pada korban eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual; kemudian keterlibatan wanita di pos-pos keamanan (*security checkpoints*), yang mana wanita memiliki posisi yang lebih diuntungkan pada saat berkomunikasi dan untuk kepentingan melacak wanita lokal di daerah konflik (Bertolazzi, 2010) (Bertolazzi, 2010).

multilateral, juga adanya peran perempuan sebagai agen perdamaian dan toleransi, serta negosiator di Kawasan. Dalam Debat Terbuka DK PBB pada tahun 2019 dengan tema “*Investing in Peace*”, Menlu Retno mengangkat isu pasukan penjaga perdamaian perempuan dan menyatakan “*investing in women, equals investing in peace*” (Kementerian Luar Negeri RI, 2019). Dukungan Pemerintah RI terhadap peran perempuan dalam MPP PBB juga dibuktikan melalui berbagai kegiatan publik yang bersifat *capacity building*, seperti pelatihan regional dengan tema “*Women, Peace and Security (WPS)*” di Jakarta dan dihadiri oleh 60 diplomat perempuan dari negara-negara anggota ASEAN.

Penelitian ini didasari oleh asumsi awal bahwa keberhasilan perempuan dalam mendukung misi MPP PBB yang diikuti oleh Indonesia, terutama di MONUSCO dan UNIFIL, disebabkan oleh beberapa faktor kunci. Pertama, karakter dan sifat dasar perempuan. Kedua, dukungan solid dari Pemerintah. Dan ketiga, keberterimaan masyarakat setempat di Kongo dan Lebanon lebih tinggi terhadap personel perempuan dibanding personel laki-laki. Untuk menguji asumsi awal tersebut, penulis akan menggunakan pendekatan yang diadvokasi oleh para pendukung teori Feminisme Liberal dan konsep *human security*. Teori Feminisme Liberal mengemukakan bahwa perempuan harus dilibatkan dalam institusi politik, sosial dan ekonomi untuk mengakhiri ketidaksetaraan gender (Reig-Amette, 2019). Dalam konteks ini Feminisme Liberal mengedepankan nilai interseksionalitas di dalam jenderisasi pasukan untuk menyeimbangi dinamika dan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan di wilayah MPP. Di sisi lain hal ini untuk mengadvokasi resolusi 1325 Majelis Umum PBB yang menyatakan komitmen akan

kesetaraan jender pada pasukan MPP dengan kesadaran pentingnya peran khusus perempuan dalam memelihara perdamaian, terkhusus bagi warga lokal perempuan dan anak-anak di wilayah MPP (United Nations Security Council, 2000).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didukung Studi Kasus Ganda dengan subjek Misi Penjaga Perdamaian di UNIFIL dan MONUSCO. Kedua Misi tersebut dipilih karena jumlah personel perempuan Kontingen Garuda yang paling banyak diantara 3 misi, serta paling mendominasi di antara negara kontributor lainnya. Penulis berpandangan bahwa teori Feminisme dan konsep *Human Security* dapat menjelaskan *rationale* efektivitas keterlibatan personel perempuan dalam menjalankan misi pemeliharaan perdamaian PBB di MONUSCO dan UNIFIL dibandingkan teori lain seperti Realisme dan *The English School*. Penelitian ini juga diarahkan untuk menguji asumsi awal yang dikemukakan sebelumnya melalui pendalaman mengenai dampak *deployment* personel perempuan terhadap pelaksanaan mandat yang diemban oleh kedua MPP PBB tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengajukan satu pertanyaan sebagai rumusan masalah penelitian, yaitu:

Apa dampak kehadiran personel perempuan Kontingen Garuda terhadap pelaksanaan mandat pada misi pemeliharaan perdamaian MONUSCO dan UNIFIL 2015-2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ada dua. Pertama, untuk membuktikan bahwa personel perempuan Indonesia dapat mendukung kesuksesan mandat dari misi pemeliharaan perdamaian PBB MONUSCO dan UNIFIL. Kedua, untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan agar kedepannya jumlah personel perempuan pada pasukan Indonesia yang diterjunkan ke MPP PBB dapat ditingkatkan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan kegunaan aplikasi teori feminisme dan *human security* dalam menjelaskan dampak keberadaan personel perempuan Indonesia dalam MPP PBB MONUSCO dan UNIFIL. Selain itu, tesis ini juga dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya dengan topik serupa namun menggunakan teori maupun konsep HI yang berbeda.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi sejumlah pemangku kepentingan, termasuk para pengambil keputusan politik luar negeri dan diplomasi pertahanan, dalam menentukan kebijakan yang berdampak pada keterlibatan personel perempuan Indonesia pada MPP PBB baik di misi MONUSCO, UNIFIL atau pada misi lainnya.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 5 bagian bab, bab pertama yaitu merupakan bab Pendahuluan yang mencakup bahasan latar belakang masalah dari topik yang diangkat oleh Peneliti, Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. Di bab ini Peneliti menjelaskan mengenai latar belakang terbentuknya Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, hingga inisiatif melibatkan personel perempuan di Misi Pemeliharaan Perdamaian secara umum.

Kemudian di bab kedua, merupakan bab yang membahas kerangka teoritis yang mencakup Tinjauan Pustaka terkait dengan topik yang diangkat, Teori Feminisme Liberal dan Konsep *Human Security* sebagai “kuncian” yang Peneliti gunakan dalam pembahasan Tesis ini, dan yang terakhir di bab ini adalah Kerangka Berpikir sebagai alur yang menjelaskan apa dan bagaimana topik penelitian ini akan berjalan.

Pada bab tiga, peneliti akan menjelaskan metode penelitian apa saja yang digunakan seperti penjelasan mengenai pendekatan penelitian kualitatif, metode studi kasus, sumber-sumber dan pengambilan data, objek apa yang akan diteliti, fokus dari penelitian ini, cara memastikan keabsahan penelitian, waktu dan tempat penelitian

Bab keempat, di bagian ini peneliti akan lebih fokus dan *deep diving* terhadap topik pembahasan yang diangkat dengan menarik korelasi antara topik dengan teori dan metode yang peneliti pilih sebagai pendukung, sehingga peneliti

bisa menemukan jawaban akan pertanyaan yang peneliti ajukan di bab dua.

Dan yang terakhir bab lima, sebagai bab penutup yang menyimpulkan dan merangkum hasil temuan peneliti yang diharapkan bisa menghasilkan saran konstruktif sebagaimana tujuan yang telah disebutkan dari penelitian ini.

